

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan Sosial (*social movement*) merupakan aktivitas yang terorganisir yang bertujuan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*) (Macionis, 2003). Berdasarkan definisi tersebut, karakteristik utama dari gerakan sosial, yakni: adanya aktivitas yang terorganisir dan adanya tujuan yang berhubungan dengan suatu perubahan sosial. Perubahan sosial ini berfokus pada perubahan dalam Masyarakat, baik dari aspek politik, sosial, maupun ekonomi.

Gerakan sosial pada umumnya muncul akibat adanya ketidakpuasan terhadap suatu isu sosial dan akhirnya memutuskan untuk membentuk kelompok dengan tujuan yang sama serta melibatkan mobilisasi sumber daya. Dalam Gerakan Sosial, aksi ini berusaha untuk mengubah norma, nilai, dan struktur sosial melalui tindakan yang berkelanjutan (Tarrow, 2011).

Greene mengemukakan bahwa Gerakan sosial adalah upaya kolektif yang terorganisir yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai perubahan sosial. Dalam pandangannya, Gerakan sosial ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh anggota Masyarakat, dan mereka berusaha untuk mengekspresikan suara mereka serta mempengaruhi kebijakan publik atau norma sosial (Greene & Shepard, 2002).

Gerakan sosial muncul akibat dari adanya suatu kegelisahan ataupun isu sosial yang terjadi di sekitar dan membentuk suatu organisasi. Organisasi ini yang nantinya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuannya dan menciptakan kesadaran di antara Masyarakat luas tentang isu-isu yang mereka perjuangkan. Demikian juga halnya dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh sejumlah buruh, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dikalangan kaum buruh (Della Porta & Diani, 2011).

Gerakan sosial merupakan suatu bentuk aksi kolektif yang terorganisir sebagai respon atas ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh Masyarakat. Dalam ketenagakerjaan, gerakan sosial sering kali diwujudkan dalam bentuk perjuangan buruh untuk memperoleh hak-hak normative yang layak, termasuk di antaranya hak atas pengupahan. Seiring dinamika ekonomi dan regulasi yang berkembang, buruh sering kali menghadapi persoalan yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan tetapi juga keterlibatan mereka dalam proses penentuan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Dalam tulisan Ingleson, Gerakan sosial di Indonesia muncul pada awal tahun 1900-an oleh petani, buruh, serta gabungan. Banyak organisasi-organisasi tersembunyi yang tumbuh sebagai bentuk perlawanan untuk mengubah keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Awal dari Gerakan sosial di Indonesia dipelopori oleh *Vereniging van Spooren Tramweg Personeel (VSTP)* yang didirikan oleh 63 buruh Eropa di Semarang. Memasuki tahun 1920-an, Gerakan sosial di Indonesia berada di tangan Gerakan buruh, baik Perkumpulan Kaum Buruh dan Tani (PKBT) ataupun *Personeel Fabriek Bond (PFB)*. Ketua PFB, Soerjopranoto, menerbitkan Boeroeh

Bergerak sebagai upaya membentuk opini publik. Tindakan yang ia ambil berhasil sehingga popularitas *PFB* melonjak (Ingleson, 2004).

Akan tetapi, melihat realitasnya sampai hari ini gerakan buruh di Indonesia tidak memberikan dampak yang begitu besar bagi kaum buruh. Hal ini berbanding terbalik pada masa kolonial tersebut. Buruh memperjuangkan dan menuntut hak-haknya yang masih menjadi sebuah hakikat di Indonesia pada setiap tahunnya. Tuntutan untuk pemenuhan hak-hak normatif tersebut menjadikan fokus utama perjuangan buruh di Indonesia.

Dalam perjuangan buruh, masalah struktural menjadi alasan utama untuk memperjuangkan hak-hak buruh secara kolektif daripada secara individu. Jika dibandingkan dengan gerakan non-organisasi, keberhasilan gerakan buruh melalui organisasi serikat pekerja saat ini lebih dapat dicapai. Pada akhirnya, para pekerja di Indonesia kini memperjuangkan hak-haknya secara terorganisasi daripada berjuang sendiri. Oleh karena itu, pembentukan serikat pekerja di Indonesia memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan pekerja dan memperjuangkan hak-hak buruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk para pekerja baik di dalam maupun di luar Perusahaan, yang memiliki sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.

Organisasi buruh terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Salah satu isu yang fundamental dalam perjuangan tersebut adalah penetapan upah minimum. Meski regulasi telah mengatur tentang mekanisme penetapan upah minimum, kenyataannya tidak jarang kebijakan tersebut dianggap tidak merepresentasikan kebutuhan riil para pekerja. Hal ini seperti yang terjadi di DKI Jakarta yang menggunakan formula penghitungan upah minimum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menuai polemik dalam menentukan UMP dan UMK tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta pada awalnya menetapkan UMP 2022 DKI Jakarta sesuai dengan formulasi peraturan tersebut yang hanya menghasilkan kenaikan sebesar 0,85 persen dari tahun sebelumnya. Ketetapan ini menuai protes dari para buruh karena nilai kenaikannya bahkan jauh di bawah nilai inflasi di DKI Jakarta (Risfa Izzati, 2022).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai kompensasi dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan untuk pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang sudah atau akan dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut, upah yang dibayarkan oleh pengusaha harus sejalan dengan kesepakatan yang menjadi tunjangan bagi para buruh. Akan tetapi, penentuan besaran upah di suatu daerah sering kali menjadi bahan perdebatan yang melibatkan berbagai kepentingan.

Secara umum, formula perhitungan upah minimum menurut peraturan tersebut berpotensi memberikan margin kenaikan upah minimum lebih kecil karena adanya batas atas yang menjadi acuan batas tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyusun kebijakan berdalih bahwa adanya batas atas dan batas bawah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan upah antar wilayah namun pihak serikat pekerja meyakini bahwa formula yang diatur di dalam peraturan tersebut merupakan legalisasi rezim upah murah yang merugikan pekerja (Caraway & Ford, 2020; Wulansari, 2021).

Penetapan upah di Indonesia diatur oleh kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk mendapatkan pendapatan yang mencukupi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk merealisasikan pendapatan yang mencukupi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, meliputi;

1. upah minimum;
2. upah kerja lembur;
3. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. bentuk dan cara pembayaran upah;
7. denda dan potongan upah;

8. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10. upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah memiliki kewajiban dalam menetapkan kebijakan pengupahan guna melindungi pekerja/buruh agar mendapatkan penghasilan yang pantas dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengupahan tersebut mencakup perlindungan terhadap struktur dan skala upah, upah minimum, upah untuk kerja lembur, upah untuk pembayaran pesangon, serta komponen lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan antara hak pekerja dan kelangsungan usaha dengan menjaga keadilan dalam penentuan upah. Upah minimum terdiri dari upah minimum yang ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum yang ditetapkan berdasarkan sektor di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Salah satu daerah yang memiliki sektor sentra industri ekonomi regional dan nasional yang terus berkembang adalah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 13.762 sentra di Indonesia pada tahun 2020 dengan sebaran terbesar terdapat di tiga provinsi di Jawa. Dengan jumlah sentra sebanyak 3.460, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan teratas dalam hal jumlah sentra industri (Databoks, 2021).

Berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah sering kali menjadi sorotan terkait isu pengupahan. Meskipun memiliki sektor industri yang berkembang pesat dan menjadi sentra ekonomi regional, Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi dengan Upah Minimum Provinsi yang relative rendah dibandingkan provinsi lain. Meskipun provinsi ini memiliki Kawasan industri yang berkembang pesat dan kontribusi besar terhadap PDB nasional, UMP Jawa Tengah masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Kondisi ini menimbulkan kecemasan di kalangan buruh karena tidak sebanding dengan beban kerja dan biaya hidup yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara produktivitas buruh dan kesejahteraan yang mereka peroleh. Ketidapuasan buruh terhadap kebijakan pengupahan ini pun mendorong munculnya aksi kolektif (Kompas.com, 2023).

Provinsi Jawa Tengah memegang peran strategis dalam perekonomian nasional terutama melalui kontribusi sektor industri yang tumbuh pesat dimana tenaga buruh menjadi salah satu faktor utama. Meskipun demikian, masalah pengupahan masih menjadi sorotan di tengah berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah. Pada akhir tahun 2023, buruh di Jawa Tengah melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah menggelar aksi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi yang dianggap tidak sesuai dengan perhitungan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), mengamati ketimpangan dalam kesejahteraan tenaga kerja.

Pada akhir tahun 2023, buruh di Jawa Tengah melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah menggelar aksi untuk

menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi yang dianggap tidak sesuai dengan perhitungan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), mengamati ketimpangan dalam kesejahteraan tenaga kerja. Dalam hal ini, penting untuk memahami dinamika organisasi buruh di Jawa Tengah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah merupakan cabang organisasi serikat buruh yang berada di tingkat wilayah provinsi. Organisasi buruh ini secara konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja di Tingkat regional sebagai bentuk dari berbagai serikat pekerja di Provinsi Jawa Tengah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah berperan aktif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan buruh melalui berbagai advokasi, dialog sosial, dan aksi massa (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, n.d.-a).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan menolak penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Menurut mereka, penetapan UMP dan UMK Jawa Tengah harus didasarkan pada peninjauan lebih dalam mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bukan hanya berpatokan dengan peraturan baru. Buruh menuntut kenaikan UMP dan UMK Jawa Tengah tahun 2024 minimal sebesar 15 persen, serta meminta agar ketentuan struktur skala upah dituangkan dalam Surat Keterangan Gubernur Jawa Tengah untuk penetapan UMP tahun tersebut. Isu pengupahan ini mencerminkan dinamika hubungan industrial di Jawa Tengah, dimana

perkembangan pesat sektor industri perlu diimbangi dengan kebijakan upah yang adil dan sesuai kebutuhan pekerja/buruh (Jatengprov.go.id, 2023).

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2.036.947 mengalami kenaikan sebesar 4,02 persen dari tahun sebelumnya. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 tahun 2023 yang merujuk pada Surat dari Menteri Ketenagakerjaan RI mengenai tata cara penetapan upah minimum (Jatengprov.go.id, 2023). Meskipun terdapat kenaikan, banyak pekerja merasa bahwa angka tersebut masih jauh dari harapan terutama dengan kebutuhan hidup para pekerja yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses penetapan upah yang melibatkan berbagai pihak termasuk serikat pekerja.

Meskipun demikian, terbitnya Surat Keputusan Gubernur tersebut memicu reaksi dari beberapa serikat buruh, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, menyatakan kekecewaannya terhadap kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2024 yang dianggap masih rendah dan tidak memenuhi harapan buruh. Pada tanggal 6 November 2023, buruh menggelar aksi penolakan di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk protes terhadap rendahnya kenaikan UMP (Joglo Jateng, 2023). Aksi ini juga dipicu oleh tidak dilibatkannya buruh dalam rapat koordinasi yang membahas pengupahan, di mana mereka merasa diabaikan dalam proses pengambilan Keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Kurangnya transparansi dalam undangan rapat yang dimana KSPI Jawa Tengah baru menerima

undangan menjelang rapat dimulai, semakin memperkuat kekecewaan buruh terhadap pemerintah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah baru menerima undangan untuk Rapat Koordinasi pada pukul 12.00 WIB padahal rapat tersebut sudah dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Situasi ini dianggap tidak transparan dan tidak mempertimbangkan kepentingan seluruh serikat buruh. Menariknya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah sebelumnya telah Menyusun kajian dan konsep terkait penetapan UMP dan UMK Jawa Tengah 2024 yang telah disampaikan kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, pada Oktober 2023 (Indoraya.News, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara Keputusan pemerintah dan aspirasi buruh yang perlu dikaji lebih dalam. Organisasi ini menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak dan tidak melibatkan secara penuh aspirasi buruh dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah yang menjadi perhatian utama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah yang berperan sebagai mobilisator utama dalam gerakan menuntut kenaikan UMP Jateng tahun 2024. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih dalam strategi gerakan yang dilakukan oleh KSPI Jateng dalam upayanya memperjuangkan kenaikan UMP Jateng tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis paparkan, terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk mendukung penelitian ini. Adapun pertanyaan tersebut,

yaitu:

1. Bagaimana Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian mengenai Gerakan sosial serta relevansinya terhadap perjuangan buruh untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Melalui analisis terhadap aksi dan strategi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, penelitian ini dapat menambah literatur tentang keterbukaan peluang politik dan jaringan sosial dalam membangun gerakan buruh. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman tentang peran actor kolektif, seperti serikat pekerja dalam memobilisasi dukungan dan memengaruhi kebijakan public.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai

pihak yang terlibat dalam dinamika hubungan industrial dan kebijakan pengupahan, yakni:

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih responsive dan adil. Dengan memahami aspirasi dan tuntutan buruh, pemerintah dapat memperbaiki mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi daerah.

2) Bagi Serikat Buruh

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang strategi yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak buruh melalui gerakan sosial. Analisis ini dapat membantu serikat buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah dalam merancang langkah advokasi yang lebih terorganisir dan berdampak.

3) Bagi Pengusaha

Hasil dari penelitian ini dapat membantu pengusaha dalam memahami pentingnya dialog sosial dengan buruh, sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Selain itu, wawasan mengenai tuntutan dan kebutuhan buruh dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas bisnis.

4) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya perjuangan buruh dalam menciptakan keadilan sosial. Hal ini

diharapkan dapat mendorong Masyarakat untuk mendukung gerakan buruh yang bertujuan menciptakan kesejahteraan Bersama.

5) Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang gerakan sosial, hubungan industrial, atau kebijakan pengupahan di Indonesia. Data dan analisis yang dihasilkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan sesuai dengan bidang ini.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Darul Fikri	Gerakan Sosial Buruh FSPMI Sidoarjo dalam Menuntut Penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan	Teori Gerakan Sosial dengan dianalisis menggunakan mekanisme Struktur Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi Sumberdaya, dan Proses Pembangkaian. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Strategi yang diterapkan FSPMI Sidoarjo menggunakan strategi bertahap berupa pengkajian konsep kebijakan, lobi kepada pemerintah, dan aksi sebagai Upaya terakhir. Selain itu, adanya faktor yang berpengaruh, meliputi struktur kesempatan politik menunjukkan adanya akses keterbukaan terhadap sistem politik, mobilisasi sumberdaya menunjukkan peran

				actor gerakan untuk menggerakkan sumberdaya internal dan jaringan eksternal, serta kerangka <i>framing</i> yang digunakan untuk membingkai isu sebagai pendorong gerakan untuk melakukan penolakan.
2	Ari Dwiantoro	Strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Menuntut Kenaikan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2014-2015	Teori Aksi Kolektif oleh Charles Tilly. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif.	KSBSI menggunakan delapan strategi dalam proses penuntutan UMK Surabaya tahun 2015, yakni keterlibatan dalam Dewan Pengupahan, komunikasi lintas serikat, penguatan isu upah minimum, advokasi berbasis data dan fakta, mobilisasi massa, rekrutmen anggota, pelatihan internal, dan pemanfaatan momentum politik. KSBSI juga menghadapi hambatan seperti lemahnya pemahaman buruh akan pentingnya serikat serta fragmentasi kepentingan antar serikat.
3	Hery Setyawan dan	Strategi Perjuangan Serikat Buruh	Teori Konflik dan Teori Gerakan Sosial.	Proses penetapan upah SBPJ-GSBI menggunakan dan

	Mochamad Arif Affandi	dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	memadukan dua strategi gerakan massa dan advokasi. Gerakan massa digunakan untuk menekan pemerintah dan dewan pengupahan. Advokasi mempunyai kedudukan untuk menguatkan gerakan massa yang dilakukan SBPJ-GSBI, besar kecilnya kenaikan upah sangat dipengaruhi dengan besar kecilnya gerakan massa.
4	Aanisah Rizq Amalia, Cantika Sashi Kirana, Debra Faradiba Achwan, Hening Dien Fasikha, Novita Fitrianiingsih	Dinamika Perjuangan KSPI dalam Menuntut Hak Kenaikan UMP Tahun 2022	Teori Gerakan Sosial Buruh, Teori Mobilisasi Sumber Daya, dan Teori Ketidakpuasan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif.	Perjuangan KSPI dalam menuntut kenaikan UMP di tahun 2022 dengan menggunakan konsep strategi yang mereka miliki, yakni melobi pemerintah hingga melakukan aksi demonstrasi, bahkan jika tetap tidak didengar sampai melakukan aksi mogok nasional untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Strategi ini belum dapat memberikan hasil yang diinginkan KSPI sehingga terus melakukan perjuangan mereka dengan ikut masuk

				dalam politik Indonesia di tahun 2024 dengan membawa isu kenaikan UMP.
5	Wahyu Putra Hardiyanto	Buruh dan Kekuatan Politik Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam Menuntut Pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan	Teori Strategi Kelompok Kepentingan dan Sistem Politik. Metode yang digunakan metode kualitatif.	Strategi KSPI dalam menuntut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan belum berjalan optimal dan efektif sehingga belum berimplikasi pada dicabutnya peraturan tersebut. Penyebabnya karena adanya hambatan-hambatan yang dialami KSPI dalam usahanya mempengaruhi kebijakan tersebut, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. <i>Pertama</i> , hambatan internal berupa isu perjuangan yang tidak focus, serikat buruh terfragmentasi, rendahnya kualitas Pendidikan buruh, tidak adanya perwakilan KSPI di parlemen dan tidak adanya dukungan dari partai politik. <i>kedua</i> , hambatan eksternal berupa ketidakberpihakan pemerintah dan adanya kepentingan

				pengusaha dibalik kebijakan PP No. 78 Tahun 2015.
6	Fatur Rahman Asrul, Wijayanto, dan Nur Hidayat	Dinamika Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pasca Orde Baru	Teori Perjuangan Kelas dan Teori Gerakan Sosial. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif.	Terdapat cikal bakal perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dimulai sejak berdirinya federasi pada Orde Baru hingga perjuangan pada era reformasi, kedua terdapat tahap-tahap advokasi yang dilakukan oleh konfederasi dalam pemutusan hubungan kerja kepada anggota di Tingkat pabrik yang diawali dengan pengumpulan data kasus hingga penyelesaian kasus, ketiga strategi perjuangan yang digunakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam mewujudkan kepentingan dengan menempatkan diri sebagai kelompok kepentingan mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan menggunakan lobby, aksi massa, <i>judicial review</i> di lembaga terkait.
7	Salsa Bila Harera	Gerakan Buruh dalam	Teori Ketidakpuasan,	Gerakan buruh menuntut kenaikan

		Peningkatan Kesejahteraan (Studi Kasus SPSI Jakarta dalam Gerakan Buruh Menuntut Kenaikan UMP)	Teori Mobilisasi Sumber daya, dan Teori Kesejahteraan Sosial	UMP yang dilakukan SPSI Jakarta dapat dikatakan berhasil karena terjadi kenaikan UMP. Dari kenaikan upah minimum tersebut juga terjadi peningkatan kesejahteraan pada kondisi kaum buruh atau pekerja karena dari kenaikan upah minimum tersebut para buruh atau pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
8	Virsa Rixdwantyo	Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi (Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah dan Kontrak Kerja)	Teori Nilai Lebih dan Teori Gerakan Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.	Praktik <i>outsourcing</i> di PT. Wahana Lentera Raya telah menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi terhadap buruh. Para pekerja yang telah bekerja selama bertahun-tahun tetap berstatus kontrak dan tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jaminan sosial, pesangon, dan upah lembur. Ketidakjelasan status kerja dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak mendorong buruh untuk melakukan aksi kolektif

				sebagai bentuk perlawanan. Perjuangan ini melibatkan konsolidasi serikat pekerja, aksi massa, dan advokasi hukum yang pada akhirnya memaksa Perusahaan memenuhi Sebagian tuntutan buruh. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik <i>outsourcing</i> dalam pekerjaan ini melanggar UU No. 13 Tahun 2003 dan menciptakan ketimpangan relasi industrial yang merugikan buruh.
9	Reifazmy Haidar Saputra, Yasser Iqbal, dan Muhammad Syahrul Ramadhan	Gerakan KASBI dalam Menuntut Kenaikan UMP di Jakarta Tahun 2022	Teori Mobilisasi Sumber daya. Metode yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif.	Upaya dan Strategi yang dilakukan oleh KASBI dalam menuntut kenaikan UMP dengan memobilisasi dukungan secara penuh dari setiap elemen masyarakat. Upaya lainnya dengan kolaborasi Bersama gerakan lainnya di luar serikat buruh yang dapat membantu gerakan buruh agar ditindaklanjuti, belum sepenuhnya terealisasikan. Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat hanya berpendapat

				bahwasannya tidak ada Tindakan lebih lanjut mengenai tuntutan di dalam aksi massa oleh KASBI.
10	Irfa' Asy'at Firmansyah dan Mawardi Purbo Sanjoyo	Gerakan Sosial Baru: Demonstrasi Buruh di Jawa Timur 2013	Teori Gerakan Sosial Baru. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kepustakaan.	Demonstrasi buruh di Jawa Timur tahun 2013 merupakan wujud dari gerakan sosial baru yang mencerminkan perlawanan terhadap sistem upah murah dan praktik <i>outsourcing</i> yang merugikan buruh serta menuntut pembentukan kebijakan upah minimum yang lebih adil melalui konsolidasi organisasi buruh dalam skala besar.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah usaha kolaboratif yang terkoordinasi oleh orang atau organisasi untuk mewujudkan perubahan sosial. Gerakan sosial ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh anggota Masyarakat, dan mereka berusaha untuk mengekspresikan suara mereka serta mempengaruhi kebijakan public atau norma sosial.

Beragam definisi mengenai Gerakan sosial banyak dikemukakan oleh para tokoh antara lain, Sidney Tarrow mengemukakan definisi Gerakan sosial sebagai

tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan Bersama dan solidaritas sosial, dalam keterlibatan berkelanjutan dengan otoritas, lawan, dan elit (Suharko, 2006). Macionis juga mengemukakan bahwa Gerakan sosial merupakan jenis perilaku kolektif yang paling signifikan (Sukmana, 2016).

Zomeran mendefinisikan Tindakan kolektif adalah aktivitas apa pun yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, otoritas, atau pengaruh seluruh kelompok, bukan beberapa orang terpilih (Van Zomeran & Iyer, 2009). Locher menyatakan bahwa ada tiga cara untuk membedakan gerakan sosial dari jenis aksi kelompok lainnya, seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan) dan *rebel* (penolakan, pembangkangan), dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (a) Pengorganisasian (*Organized*); (b) Perimbangan (*Deliberate*); dan (c) Daya tahan (*Enduring*).

Menurut definisi yang dijelaskan di atas, Mansoer Fakhri menyatakan bahwa Gerakan Sosial dapat didefinisikan sebagai kelompok yang terorganisasi secara longgar yang bekerja untuk tujuan sosial, khususnya perubahan struktur dan nilai sosial (Mansoer & Zubir, 2002). Robert Mises dalam bukunya yang berjudul *Theory of Social Movements* menggambarkan Gerakan Sosial sebagai Kumpulan ide dan perilaku yang tidak dilembagakan oleh sekelompok individu untuk mendorong atau menghalangi perubahan sosial (Mises, 2004).

Beberapa Kesimpulan dapat ditarik dari berbagai definisi Gerakan sosial yang diberikan di atas, antara lain Gerakan sosial merupakan fenomena kolektif yang mewakili inisiatif Masyarakat untuk mendorong perubahan sosial. Secara umum, Gerakan sosial dimulai sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan atau

ketidakadilan yang dirasakan oleh individu maupun kelompok Masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk menyuarakan pendapat, membela hak, dan mengubah norma sosial atau kebijakan public yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Para ahli menyatakan bahwa Gerakan sosial dicirikan dengan bentuk terorganisir, baik secara formal maupun informal, dengan tujuan yang jelas untuk mengupayakan reformasi. Selain itu, Gerakan sosial diidentifikasi sebagai jenis perilaku kolektif yang terorganisasi. Gerakan sosial merupakan sebuah fenomena yang muncul dari tuntutan Masyarakat sering kali diarahkan untuk menyoroti kekurangan atau ketidakcukupan yang ada dalam kebijakan pemerintah. Akibatnya, Gerakan sosial berfungsi sebagai kendaraan bagi perjuangan Masyarakat Dengan demikian, Gerakan sosial bukan hanya wujud dari bentuk ketidakpuasan, tetapi juga alat yang digunakan Masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan reformasi. Aspirasi kolektif untuk membangun struktur sosial yang lebih adil yang memenuhi tuntutan Masyarakat tercermin dalam Gerakan ini

Upaya Gerakan sosial juga terjadi dalam fenomena perbedaan kelas yang didasarkan pada kepemilikan alat produksi. Hal ini seperti pada konsep kelas yang dijelaskan oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa Masyarakat diklasifikasikan ke dalam dua kelas utama: kelas borjuis, yang memiliki alat produksi, dan kelas proletar, yang tidak. Kelas borjuis memiliki kepentingan untuk mempertahankan sistem kapitalis, yang menguntungkan mereka. Kelas proletary memiliki kepentingan untuk mengubah sistem kapitalis, yang menindas mereka. Kedua kelas ini memiliki kepentingan yang bertentangan, yang mengarah pada konflik sosial.

Marx meyakini bahwa konflik antara kelas-kelas sosial akan mengarah pada perubahan sosial, baik melalui revolusi maupun reformasi (Fadillah, 2023).

Pada kasus yang diangkat oleh peneliti, ketidakpuasan buruh dalam perumusan dan penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah memicu gerakan sosial buruh dalam memperjuangkan haknya. Perjuangan kelas yang dipicu oleh ketidakadilan terhadap kebijakan ekonomi yang memberikan dampak terhadap buruh sebagai kelas proletary. Upaya Gerakan buruh di Tingkat provinsi ini untuk memperjuangkan kenaikan upah mencerminkan pentingnya analisis mendalam sebagai subjek serta objek dalam teori Gerakan sosial.

1.5.2.2 Teori Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization Theory)

Salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk studi gerakan sosial adalah Teori Mobilisasi Sumberdaya. Menurut pemikiran ini, gerakan sosial merupakan reaksi terhadap masalah umum. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya gerakan sosial yang didirikan atas identitas dan pengetahuan tentang isu-isu yang dihadapi Masyarakat secara keseluruhan, melainkan kesadaran kelas dan ideologi tertentu.

Zurcher dan Snow (Klandermans, 1984), berpendapat bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* merupakan respon terhadap pandangan umum tentang teori psikologi sosial tentang gerakan sosial. Para ahli teori dalam psikologi sosial biasanya menggunakan partisipasi orang-orang dalam suatu Gerakan sosial atas dasar sifat-sifat kepribadian (*personality traits*), marginalisasi dan keterasingan (*marginality and alienation*), serta ketidakpuasan dan ideologi (*grievances and ideology*).

Sementara itu, Oberschall, McCarthy dan Zald, Gamson, dan Tilly (Pichardo, 1988), mempelajari berbagai komponen yang dibutuhkan untuk sebuah Gerakan dan bagaimana komponen-komponen ini, khususnya sumberdaya, dimobilisasi untuk digunakan dalam sebuah Gerakan. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan pemahaman atas faktor-faktor yang mengarah pada pembentukan Gerakan sosial, khususnya kondisi lingkungan dan fisik yang mungkin berdampak pada pertumbuhan dan pelaksanaan gerakan. Konsep ini merupakan dasar bagi lahirnya teori mobilisasi sumberdaya (*the resource mobilization theory*) tentang Gerakan sosial. Halebsky menyatakan bahwa teori mobilisasi sumberdaya mencampurkan perilaku Gerakan sosial (*social movement behavior*) dengan perilaku politik (*political behavior*). Secara umum, model ini menyatakan bahwa akses kelompok terhadap sumber daya Masyarakat ditentukan oleh keberadaan entitas pemerintah.

Teori Mobilisasi Sumber Daya menyoroti keterbatasan fenomena gerakan sosial serta dukungan komunitasnya. Teori ini meneliti berbagai sumber daya yang perlu dihimpun, bagaimana gerakan sosial berhubungan dengan kelompok lain, seberapa besar ketergantungannya pada bantuan luar agar berhasil, dan strategi yang digunakan otoritas untuk mengelola atau menyatukan gerakan (McCarthy & Zald, 1977). Dalam hal ini, keberhasilan suatu Gerakan sosial sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya yang tersedia, baik dari basis pendukung, strategi dan taktik, maupun hubungan dengan Masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber

daya internal dan pemanfaatan factor eksternal dalam membangun strategi yang efektif dan mencapai tujuan dari Gerakan sosial.

Pichardo (Pichardo, 1988:98) mengungkapkan, dua model analisis dalam pendekatan Teori Mobilisasi Sumber Daya, yaitu:

- 1) *The Political-interactive model (The Political process models)*, model ini lebih menekankan bahwa keberhasilan Gerakan sosial sangat bergantung pada struktur kesempatan politik yang tersedia dan keberadaan jaringan sosial yang terbangun. Model ini memberikan hubungan antara Gerakan sosial dengan sistem politik menjadi factor kunci. Negara yang kuat dan represif sering kali menghalangi Gerakan sosial untuk mencapai tujuannya, sementara struktur politik yang lebih terbuka memberikan peluang lebih besar bagi keberhasilan Gerakan. Selain itu, model ini juga menekankan pentingnya kapasitas komunitas dalam membangun organisasi Gerakan sosial yang efektif untuk mendukung aksi kolektif. Dalam model ini, terdapat dua faktor yang menjadi kunci dalam membangun organisasi gerakan sosial, yakni *Pertama*, Struktur Peluang Politik merupakan konsep kunci dalam teori proses politik yang merujuk pada dimensi eksternal dan institusional dari lingkungan politik yang memungkinkan atau menghambat Tindakan kolektif. Menurut McAdam, struktur peluang politik adalah aspek dari sistem politik yang menciptakan intensif bagi orang untuk terlibat dalam Tindakan kolektif dengan memengaruhi harapan keberhasilan atau risiko kegagalan. Dalam hal ini, menekankan bahwa

struktur peluang politik bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, baik karena perubahan institusional maupun krisis dalam sistem politik. Dengan kata lain, peluang politik adalah kondisi objektif yang dapat dimanfaatkan oleh actor gerakan untuk menekankan perubahan.

Kedua, Keberadaan Jaringan Sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi munculnya partisipasi individu dalam aktivitas kolektif. Pendekatan ini melihat individu bukan sebagai actor terisolasi, melainkan sebagai bagian dari hubungan sosial yang membentuk preferensi, keyakinan, dan Keputusan mereka untuk bertindak. Jaringan sosial berperan sebagai saluran informasi, identitas, dan solidaritas yang memungkinkan proses mobilisasi berjalan lebih efektif. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks gerakan dengan risiko tinggi seperti protes jalanan, aktivisme politik, atau perjuangan hak sipil. Menurut Doug McAdam, peran jaringan sosial dalam mobilisasi gerakan sosial melalui studinya yang berjudul *Freedom Summer* (1988) menemukan bahwa relawan yang memiliki hubungan pribadi dengan aktivis atau organisasi terkait dengan proyek *Freedom Summer* lebih cenderung untuk bergabung dengan gerakan, bertahan dalam program yang menantang dan berisiko, terlibat dalam aktivitas gerakan setelah proyek berakhir. Dengan kata lain, keterlibatan seseorang dalam jaringan sosial yang berdekatan dengan gerakan menjadi predictor kuat terhadap Keputusan mereka untuk bertindak secara kolektif.

2) *The Organizational-entrepreneurial model (The Professional organizer model)*, model ini menekankan pada peran penting organisasi formal dalam menjalankan Gerakan sosial. Dalam model ini, kepemimpinan yang kuat, manajemen sumber daya yang baik, dan dinamika organisasi menjadi elemen utama dalam menentukan keberhasilan. Organisasi formal dianggap sebagai penggerak utama yang bertindak sebagai kendaraan bagi Gerakan sosial, dengan pendekatan yang serupa dengan teori pengembangan organisasi untuk merencanakan dan mencapai tujuan.

Oberschall berpendapat bahwa kemampuan gerakan untuk berhasil atau gagal ditentukan oleh jumlah anggotanya, gaya kepemimpinannya, pengorbanan yang dilakukan, dan kemampuan untuk menahan pertentangan. Ia juga menyatakan bahwa kelompok sosial yang terbagi lebih berpeluang memunculkan Gerakan sosial karena keanggotannya cenderung berasal dari kelas tertentu dalam Masyarakat. Pembagian ini memperbesar potensi mobilisasi ke dalam organisasi Gerakan sosial (*Social Movement Organization/SMO*) karena adanya kesamaan keinginan Bersama di antara anggota kelompok (Locher, 2002).

Kelompok sosial yang sudah memiliki jaringan komunikasi mapan, pemimpin dengan kemampuan memadai, partisipasi tradisional, dan infrastruktur pendukung seperti tempat pertemuan, kegiatan rutin, serta symbol dan Bahasa yang sama, lebih mudah untuk dimobilisasi. Dalam hal ini, peran pemimpin sangat penting untuk mengarahkan mobilisasi, merespon ketidakpuasan, memilih taktik yang tepat, dan mengelola infrastrukturnya yang diperlukan untuk mendukung

keberhasilan Gerakan sosial. Berikut ini merupakan factor-faktor yang menentukan Mobilisasi Sumber Daya dalam suatu Gerakan Sosial, yaitu:

1) Organisasi Gerakan Sosial

Menurut McLaughlin, ciri-ciri utama Gerakan sosial meliputi adanya sistem nilai Bersama, perasaan dari komunitas, norma Tindakan, dan struktur organisasi. Killian juga berpendapat dalam kajiannya tentang struktur peran, posisi, dan norma di antara partisipan Gerakan sosial, berkesimpulan bahwa organisasi merupakan komponen krusial dari sebuah gerakan sosial. Pengelolaan sumber daya (*resource*) yang efektif sangat penting bagi setiap *Social Movement Organization (SMO)*. Menurut Arnold dan Feldmen, karakteristik dari organisasi Gerakan sosial ditandai oleh tiga faktor, yakni: 1) organisasi tersebut terdiri atas individu dan kelompok; 2) organisasi tersebut diarahkan untuk mencapai suatu tujuan; dan 3) organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuannya kemudian menerapkan koordinasi dan spesialisasi. Menurut Kriesi, struktur internal organisasi Gerakan sosial harus memiliki ciri-ciri berikut: 1) Formalisasi, yang meliputi aturan tertulis, prosedur yang ditetapkan, kepemimpinan formal, kantor permanen, dan kriteria serta persyaratan formal untuk keanggotaan; 2) Profesionalisasi, yang meliputi memiliki staf profesional yang dibutuhkan dengan sistem karier dan gaji yang jelas; 3) Diferensiasi internal, yang meliputi fungsi penyatuan teritorial dan pembagian kerja; dan 4) Integrasi, yang

melibatkan koordinasi melalui mekanisme vertical dan horizontal.

2) Pemimpin dan Kepemimpinan

Menurut Robbins, Arnold dan Feldman, kepemimpinan adalah proses memengaruhi dimana pemimpin (*leader*) berupaya mengubah perilaku satu orang atau lebih. Selain itu, Arnold dan Feldman juga menyebutkan terdapat lima cara pemimpin dapat memberikan pengaruh atas orang lain, yaitu: 1) *reward power*, yang mengacu pada kapasitas pemimpin untuk memberikan hadiah kepada pengikut; 2) *coercive power*; yang merupakan kapasitas seorang pemimpin untuk memberikan tekanan dan disiplin kepada pengikut; 3) *legitimate power*, yang merupakan wewenang yang dimiliki seorang pemimpin karena posisi atau fungsi mereka di dalam suatu kelompok atau organisasi; 4) *expert power*, yang merupakan wewenang yang dimiliki seorang pemimpin karena pengetahuan atau kemahirannya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan bawahannya; dan 5) *referent power*, yang merupakan wewenang yang dimiliki seorang pemimpin berdasarkan seberapa banyak bawahan mengidentifikasi dan ingin meniru pemimpin mereka. *Referent power* sepenuhnya bergantung pada kualitas dan atribut seorang pemimpin. Gusfield menuliskan beberapa peran yang dapat dimainkan seorang pemimpin dalam suatu Gerakan, yakni sebagai mobilisator, menginspirasi partisipan, dan di luar Gerakan pemimpin berfungsi sebagai articulator yang menghubungkan antara Gerakan dengan Masyarakat luas.

3) Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya

Edwards dan McCarthy (Snow et al., 2004) menyebutkan lima model sumberdaya (*resource*), yakni: 1) sumber daya moral, seperti dukungan dari individu atau tokoh terkenal, dukungan solidaritas, dukungan simpati, dan legitimasi atau hak kekuasaan. Sebagai penghubung antara operasi organisasi di Tingkat meso dan mikro dan lingkungan budaya makro, legitimasi menjadi sangat penting. Model ini biasanya disediakan oleh sumber-sumber luar dan cenderung berasal dari luar gerakan sosial atau organisasi gerakan sosial. 2) sumberdaya kultural, merupakan produk budaya seperti Kumpulan pengetahuan konseptual dan khusus yang dikenal secara umum, meskipun tidak harus universal. Dalam hal ini, ini termasuk pengetahuan implisit tentang cara melakukan kegiatan tertentu seperti menangani protes, mengadakan konferensi pers, menyiapkan rapat/pertemuan, membentuk sebuah organisasi, memulai festival, atau menggunakan internet. Tidak setiap anggota Masyarakat atau kelompok memiliki keterampilan atau informasi unik yang dapat bermanfaat bagi Gerakan sosial atau organisasinya. Produk dari sumberdaya kultural menjadi fasilitas dalam proses rekrutmen dan sosialisasi kepada pengikut baru dan membantu Gerakan memelihara kesiapan dan kapasitas mereka untuk Tindakan kolektif. 3) sumberdaya organisasi-sosial, seperti kelompok sosial yang disengaja dan sesuai. Organisasi yang dibuat secara khusus untuk memajukan tujuan Gerakan sosial dikenal sebagai organisasi sosial yang

disengaja. Sebaliknya, organisasi sosial yang sesuai didirikan untuk memungkinkan pelaku gerakan memperoleh sumber daya melalui mereka daripada untuk memajukan tujuan gerakan. Telah dibuktikan bahwa kedua jenis organisasi sosial memainkan peran penting dalam menjelaskan pola mobilisasi gerakan. Oleh karena itu, mobilisasi dan aktivitas gerakan yang lebih banyak akan dimungkinkan di Lokasi tertentu jika sumber daya organisasi sosial tersedia. Terdapat tiga bentuk dari sumberdaya organisasi sosial, yakni: infrastruktur, jaringan sosial, dan organisasi. 4) sumberdaya manusia, yang meliputi sumber-sumber seperti: tenaga kerja, pengamanan, keahlian, dan bakat. Dalam hal ini, sumber daya manusia lebih bersifat individual daripada sistem organisasi yang bersifat sosial atau budaya. Dengan pengecualian situasi yang parah seperti kerja paksa dan pemerasan, individu biasanya memiliki wewenang untuk mengatur bagaimana tenaga kerja dan sumber daya manusia digunakan. Akses ke gerakan khusus atau Organisasi Gerakan Sosial (*SMOs*) dimungkinkan oleh keterlibatan individu. Dibandingkan dengan sumber daya organisasi sosial, organisasi gerakan sosial memiliki waktu yang lebih mudah untuk merekrut dan mengerahkan tenaga kerja mereka. Akan tetapi, kerja sama dari mereka yang terlibat membatasi kemampuan gerakan untuk mengerahkan personel. Selain itu, hubungan sosial, tanggung jawab, dan komitmen moral, serta pertimbangan ekonomi dan spasial, memengaruhi keterlibatan mereka. 5) sumberdaya material, meliputi

moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan perbekalan. Pada model ini, uang menjadi lebih fungsional dalam proses mobilisasi Gerakan.

4) Jaringan dan Partisipasi

Dalam temuan Passy dan Giugni (Passy & Giugni, 2001), jaringan sosial (*social network*) memiliki dampak pada keterlibatan orang dalam gerakan sosial. Sejumlah studi juga menunjukkan keberkaitan antara jejaring sosial dan keterlibatan atau partisipasi individu dalam Tindakan kolektif. Seperti Snow, Zurcher, dan Eklandson, menyatakan bahwa jejaring sosial berfungsi sebagai faktor pemersatu bagi mayoritas anggota (sekitar 60% sampai 90%) dari berbagai organisasi politik dan agama. Selanjutnya, Wasserman dan Faust mengemukakan bahwa jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari kompleks hubungan diadik antara actor (seperti individu atau organisasi) dan satu actor itu sendiri. Pada pandangan ini menawarkan metode langsung untuk memeriksa keseluruhan struktur entitas sosial dari perspektif jejaring sosial.

5) Peluang dan Kapasitas Masyarakat

Huten dan Staggenborg menyatakan bahwa pendanaan untuk inisiatif dan program tertentu sering kali berasal dari luar lingkungan dan dapat bersifat swasta, nirlaba, atau publik. Jaringan koneksi di dalam komunitas local, khususnya kemampuan komunitas local untuk mengintegrasikan kelompok eksternal lain ke dalam komunitas, menentukan kemampuan untuk menggunakan sumber pendanaan

eksternal. Pandangan ini menyoroti transisi ke organisasi komunitas yang lebih terspesialisasi dari pendekatan kelembagaan komunitas yang lebih komprehensif. Menentukan cara menggabungkan komponen penting dari “perspektif Masyarakat” (*the institutional community perspective*) dan Gerakan sosial yang terorganisir (*the organized Social movement perspective*) adalah isu utama yang perlu diteliti dalam penelitian untuk mengidentifikasi kondisi komunitas lokal yang memungkinkan mobilisasi untuk Tindakan kolektif. Dengan demikian, pola dan jenis jaringan local dan eksternal akan dihasilkan oleh faktor lingkungan komunitas lokal. Struktur formal komunitas local diciptakan oleh jaringan local dan eksternal melalui kapasitas untuk memobilisasi sumber daya. Kerangka formal komunitas local memfasilitasi aktivitas terorganisasi di dalam komunitas.

Dengan merujuk pada teori mobilisasi sumberdaya melalui pendekatan *The Political-Interactive Model*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi gerakan KSPI Jawa Tengah dijalankan dalam memperjuangkan kenaikan upah. Model ini menekankan dua hal penting, yaitu struktur kesempatan politik dan keberadaan jaringan sosial. Struktur kesempatan politik menggambarkan seberapa besar peluang yang dimiliki buruh untuk terlibat dalam proses pengambilan Keputusan, misalnya melalui ruang dialog dengan pemerintah. Sementara itu, jaringan sosial mencerminkan hubungan dan kerja sama antar serikat pekerja yang menjadi kekuatan dalam menggalang dukungan dan menggerakkan massa. Kedua indicator ini sangat relevan dengan focus penelitian karena strategi KSPI Jawa

Tengah tidak hanya bergantung pada aksi massa tetapi juga pada kemampuan mereka dalam membaca situasi politik dan membangun kekuatan Bersama melalui jaringan yang dimiliki.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2
Operasionalisasi Konsep

Teori	Indikator
<i>The Political-interactive model (The Political process models)</i>	Keberhasilan Gerakan sosial ditentukan oleh: 1. Struktur Peluang Politik, untuk menilai bagaimana konteks eksternal dalam menciptakan ruang bagi Tindakan kolektif. Komponen penting dalam indicator ini, antara lain keterbukaan sistem politik; ketidakstabilan aliansi elite; adanya sekutu elite; dan penurunan kapasitas dan kecenderungan represif negara. 2. Keberadaan Jaringan Sosial, berfungsi sebagai saluran mobilisasi, yaitu jalur di mana informasi, ideologi, dan semangat gerakan tersebar. Konsep dalam jaringan sosial digunakan, sebagai individu direkrut ke dalam gerakan; menganalisis pola hubungan antaranggota gerakan; mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan struktur gerakan berdasarkan hubungan sosialnya. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan model ini dan lebih lanjut dilihat dari factor-faktor yang menentukan dalam keberhasilan Gerakan sosial tersebut.

1.7 Metode Penelitian

Teknik penelitian merupakan pendekatan atau Tindakan yang mengikuti serangkaian pedoman untuk memastikan bahwa tugas-tugas praktis diselesaikan secara metodis dan terarah guna memaksimalkan hasil (Charnes et al., 1997). Metode memainkan peran penting dalam mencapai tujuan penelitian yang diantisipasi berdasarkan masalah utama sebagaimana yang telah digariskan peneliti dalam rumusan masalah.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Tujuan menggunakan pendekatan ini karena pelaksanaan penelitian ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan. Metode kualitatif melibatkan peneliti yang melakukan wawancara dan pemahaman pengalaman dan praktik informan dalam menempatkannya secara tepat dalam konteks penelitian.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan yang diambil mengenai Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, maka penelitian ini akan lebih ditekankan dalam lingkungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa

Tengah yang berkedudukan di Kota Semarang sebagai pusat aktivitas organisasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah merupakan salah satu aktor utama dalam gerakan buruh di Jawa Tengah dan memainkan peran sentral dalam mobilisasi aksi serta penyusunan konsep alternatif kebijakan pengupahan.

Selain aktif dalam advokasi dan aksi massa, KSPI Jawa Tengah juga tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi yang merupakan forum resmi dalam proses penetapan kebijakan pengupahan. Keterlibatan KSPI Jawa Tengah di ruang kelembagaan ini menjadikan lokasinya sangat relevan untuk mengkaji strategi gerakan dari sisi institusional maupun gerakan akar rumput.

Pemilihan Provinsi Jawa Tengah secara lebih luas juga dipertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki banyak Kawasan industri, populasi buruh yang besar, dan Tingkat upah minimum yang tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang disebutkan dalam penelitian ini adalah sumber berhubungan dengan sumber penyediaan informasi yang menjadi fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang ditulis oleh narasumber, memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan penelitian dan dapat memberikan informasi yang relevan dan berkompeten untuk penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber mendukung data primer dan berasal dari sumber tertulis. Data sekunder dapat berupa buku, dokumen-dokumen, jurnal, situs web, dan lain-lain semuanya dapat berisi data sekunder.

1.7.3 Instrumen Penelitian

Secara umum, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk sebuah penelitian.

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya ialah peneliti itu sendiri, namun setelah fokus penelitiannya jelas maka dikembangkan instrumen penelitian yang sederhana. Pengembangan instrumen penelitian sederhana diharapkan akan melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya, proses yang dilaksanakan adalah terjun langsung ke lapangan setelahnya.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai dasar dan titik acuan untuk mewawancarai informan. Informan yang disebutkan adalah yang tercantum sebagai informan yang telah dijelaskan diatas.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Berbagai prosedur pengambilan informan akan digunakan untuk

mengidentifikasi informan yang akan dipilih untuk penelitian. Setiap elemen atau orang dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai informan saat menggunakan Teknik pengambilan informan ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive* dengan pemilihan secara terstruktur (Suyanto & Sutinah, 2005).

Maka dari itu melalui rancangan penelitian, informan yang akan diwawancarai dalam penelitian kali ini dengan melakukan wawancara terstruktur kepada:

1. Aulia Hakim S.H., Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah.
2. Luqmanul Hakim, Ketua Pelaksana Aksi Buruh.
3. Yohanes dan Sumartono, Perwakilan Serikat Buruh di Tingkat Basis.
4. Adi Nugroho S.E., Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
5. M. Safali S.H., Lembaga Bantuan Hukum Kota Semarang.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

a. Wawancara

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data krusial adalah wawancara. Wawancara ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan informan sebagai subjek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Pawito, 2007). Pedoman

tanya jawab digunakan dalam melakukan wawancara. Dalam wawancara, Teknik tatap muka yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi factual dan dapat menilai kepribadian setiap orang untuk tujuan penyuluhan dan lain sebagainya (Kartono, 1990).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan dengan cara menelusuri dan meneliti data asli, baik dari buku, jurnal, catatan, arsip, artikel cetak maupun *online*, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian (Kunto, 1998).

1.7.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah bersifat interaktif, menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (Miles et al., 2020).

Analisis interaktif terdiri dari komponen-komponen tertentu, yaitu:

1. Reduksi data; proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah sejumlah data besar yang muncul dari catatan tekstual sesuai dengan fokusnya. Reduksi data berkelanjutan dilakukan selama penelitian. Proses reduksi data ini terus berlangsung hingga penelitian lapangan selesai dan hasil laporan selesai. Reduksi data merupakan jenis analisis yang menyempurnakan, mengkategorikan, memfokuskan, menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan menyusun kata sedemikian rupa untuk menghasilkan kesimpulan yang sesungguhnya.

2. Penyajian data; Kumpulan data terorganisasi yang memungkinkan penarikan Kesimpulan atau Tindakan dan umumnya mudah dilihat. Dengan memeriksa cara penyajian data, temuan penelitian diharapkan menjadi jelas. Metode penyajian data yang umum dalam penelitian kualitatif adalah melalui penulisan naratif.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi; proses mengevaluasi keakuratan, konsistensi, dan kesesuaian interpretasi yang dihasilkan dari penelitian. Data penelitian tidak menghasilkan Kesimpulan yang pasti. Bergantung pada kapasitas catatan lapangan yang dikumpulkan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan Tingkat keterampilannya, Kesimpulan akhir ini mungkin tidak terungkap hingga pengumpulan data terakhir.

1.7.7 Keabsahan Data

Kebenaran objektif harus diungkapkan melalui penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa validitas data sangat penting dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat dicapai melalui validitas data. Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh validitas data. Triangulasi adalah metode verifikasi kebenaran data dengan menggunakan apa pun selain data untuk membandingkan atau memeriksa data.

Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan keabsahan data penelitian. Menurut Moleong triangulasi dengan sumber adalah penilaian dan perbandingan tingkat keandalan data yang dikumpulkan dari banyak sumber (Moleong, 2007). Hal ini dilakukan dengan cara bertanya kepada informan lain secara berulang-ulang

hingga mencapai kejenuhan data guna memverifikasi informasi yang dikumpulkan dari seorang informan.

Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh beberapa informan yang memiliki posisi strategis dan keterlibatan langsung dalam konteks yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua KSPI Jawa Tengah, sementara informan lainnya terdiri dari actor-aktor yang memiliki peran penting dalam struktur organisasi dan dinamika gerakan, seperti Ketua Pelaksana Aksi dan perwakilan serikat buruh di Tingkat basis. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang sama atau sepadan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan secara sistematis.

Proses triangulasi juga dilakukan secara berulang hingga tercapai kejenuhan data, yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh dari berbagai sumber telah menunjukkan pola yang konsisten dan tidak lagi menghasilkan temuan baru. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berupaya untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki derajat keandalan yang tinggi dan merepresentasikan sudut pandang yang beragam dalam lingkungan sosial yang diteliti.